

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

AFIFAH NUR ISLAMI

14810078

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU EKONOMI ISLAM**

OLEH:

AFIFAH NUR ISLAMI

14810078

PEMBIMBING:

MUH. RUDI NUGROHO, S.E., M.Sc.

NIP. 19820219 201503 1 002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-894/Un.02/DEB/PP.05.3/03/2018

Skripsi/tugas akhir dengan judul:

**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2011-2015**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Afifah Nur Islami

NIM : 14810078

Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu, 28 Februari 2018

Nilai : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc.

NIP. 19820219 201503 1 002

Penguji I

Muhammad Ghafur Wibowo, S.E., M.Sc.

NIP. 19800314 200312 1 003

Penguji II

Miftakhul Choiri, S.Sos.I., M.S.I

NIP. 19821009 201503 1 003

Yogyakarta, 05 Maret 2018
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dekan

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag

NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afifah Nur Islami

Kepada
Yth. Bapak Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Afifah Nur Islami

NIM : 14810078

Judul Skripsi : **"Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Pembimbing,

Muh. Rudi Nugroho, S.E., M.Sc

NIP. 19820219 201503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afifah Nur Islami
NIM : 14810078
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *bodynote*, *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi, dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Penyusun



Afifah Nur Islami
NIM: 14810078

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifah Nur Islami
NIM : 14810078
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penuli/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 22 Februari 2018
Yang menyatakan



(Afifah Nur Islami)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tak ada sesuatu yang kebetulan. Tetapi, banyak hal yang bisa dibetulkan. Selamat memperbaiki. Selamat menjadi lebih baik”.

“Jalan Allah belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, namun sudah pasti yang terbaik”.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas limpahan rahmat dan ridho Allah

SWT, skripsi ini saya persembahkan:

Teruntuk orang terhebat dalam hidup, Abi dan Ummi (Maryanto dan Tutik Setyaningsih). Terima kasih yang tiada terkira dalam bilangan dan tiada terbatas dalam waktu. Terima kasih untuk segala cinta, doa dan dukungannya.

Teruntuk yang tersayang keluarga, sahabat dan semua pihak yang telah menemani berjuang sejauh ini.

Teruntuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef

ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. *Ta'marbūtah*

Semua *Ta'marbūtah* ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang dikutip oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

◌َ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
◌ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
◌ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati		Ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Dammah + wawumati		Ditulis	<i>au</i>
		قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti oleh huruf *Syamsiyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyah* tersebut.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015”**. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata I Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi MA. Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Sunaryati, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Muh. Rudi Nugroho, SE., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengalaman pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.

6. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga tercinta Abi dan Ummi, Maryanto dan Tutik Setyaningsih, serta saudaraku Zulfa Khoirunnisa, Nabila Salsabila dan Fariz Arham Huda yang telah menjadi inspirasi, sumber motivasi terbesar dalam hidup penulis serta dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat tersayang Galih Riana Devi, Nugraheni Widyaningsih, Ana Rohmadlon, Fitri Rahmawati, Dwi Martanti, Sri Runtiningsih, Adinda Salsabila, Luthfi Rahmawati, Kholifah, Ika Yuni Lestari, Ulfa Nafisah dan Healga yang telah menemani berjuang sejauh ini.
9. Teman-teman angkatan 2014 Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Teman-teman KKN '93 Karangtalun, Wukirsari, Imogiri, Bantul.
11. Keluarga besar ForSEBI UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk belajar banyak hal.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir serta dalam menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan melebihi apa yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Penyusun



Afifah Nur Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN LITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
INTISARI	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
C. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Pengukuran Kinerja Pemerintah.....	10
2. Efisiensi	11
3. Efisiensi Dalam Pandangan Islam	14
4. Pendapatan Asli Daerah.....	16
5. Dana Alokasi Khusus	20

6. Belanja Daerah	22
7. Kemiskinan.....	25
8. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam	27
9. Jumlah Penduduk.....	29
10. Produk Domestik Regional Bruto.....	30
11. Pendidikan	31
B. Telaah Pustaka	33
C. Kerangka Pemikiran	42
D. Pengembangan Hipotesis.....	44
1. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur	44
2. Pengaruh PDRB terhadap Efisiensi Kinerja Kebijakan Fiskal di Jawa Timur	45
3. Pengaruh Pendidikan terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur	47
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel.....	47
C. Data dan Teknik Permerolehannya.....	48
D. Definisi Operasional Variabel	48
E. Metode Analisis.....	50
1. <i>Stochastic Frontier Approach</i> (SFA)	50
2. Regresi Data Panel.....	53
a. Uji Chow atau <i>Likelihood Ratio-Test</i>	54
b. Uji Hausman	55
c. Koefisien Determinasi.....	55
d. Uji Statistik F	56
e. Uji t (Uji Parsial).....	57
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	58
A. Deskripsi Umum Penelitian	58
B. Deskripsi Variabel Penelitian	60

C. Hasil Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur	
Tahun 2011-2015 Dengan Metode SFA.....	71
D. Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur Tahun 2011-2015.....	83
E. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pendidikan terhadap	
Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur Menggunakan Panel.....	87
1. Uji Pemilihan Model	87
2. Hasil Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	90
3. Pengujian Hipotesis	91
a. Uji F.....	91
b. Koefisien Determinasi	92
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).....	93
4. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal.....	93
5. Pengaruh PDRB terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal	95
6. Pengaruh Pendidikan terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal.....	98
F. Pandangan Islam terhadap Hasil Penelitian.....	99
BAB V PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Telaah Pustaka	39
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota.....	61
Tabel 4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota.....	63
Tabel 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota	66
Tabel 4.4 Nilai Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota.....	69
Tabel 4.5 Rata-Rata Efisiensi Kinerja Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.....	81
Tabel 4.6 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).....	85
Tabel 4.7 Hasil Uji Chow.....	88
Tabel 4.8 Hasil Uji Hausman.....	89
Tabel 4.9 Hasil Regresi <i>Fixed Effect Model</i>	90
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik F.....	92
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi	93
Tabel 4.12 Laju pertumbuhan PDRB.....	97
Tabel 4.13 Rata-Rata Lama Sekolah.....	98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Realisasi APBD	3
Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi	5
Grafik 4.1 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Madura	72
Grafik 4.2 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Malang	74
Grafik 4.3 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Besuki	75
Grafik 4.4 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Bojonegoro.....	77
Grafik 4.5 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Madiun	78
Grafik 4.6 Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Kediri	80
Grafik 4.7 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	84
Grafik 4.8 Realisasi Belanja Daerah	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	43
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian Metode SFA	108
Lampiran 2 Data Penelitian Regresi Data Panel	112
Lampiran 3 Hasil Metode SFA	117
Lampiran 4 Hasil <i>Common Effect Model</i>	128
Lampiran 5 Hasil <i>Fixed Effect Model</i>	128
Lampiran 6 Hasil <i>Random Effect Model</i>	129
Lampiran 7 Hasil Uji Chow	130
Lampiran 8 Hasil Uji Hausman.....	131
Lampiran 9 Curriculum Vitae	131

INTISARI

Keberhasilan kinerja fiskal merupakan tolok ukur untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tingkat kesejahteraan masyarakat diproksikan dengan jumlah penduduk miskin. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, sehingga berdampak pada kinerja fiskal yang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur dengan menggunakan pendekatan *Stochastic Frontier Approach* (SFA). Kemudian dari hasil nilai efisiensi SFA dilakukan uji regresi data panel dengan menggunakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai efisiensi kinerja fiskal.

Hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan SFA menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efisien kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 tidak mencapai nilai efisiensi yang sempurna. Kemudian hasil dari regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, dan pendidikan berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal. Sedangkan secara parsial variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap efisiensi kinerja fiskal. Kemudian variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap efisiensi kinerja fiskal. Dan variabel pendidikan tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal.

Kata kunci: kinerja fiskal, efisien, jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan.

ABSTRACT

The success of fiscal performance is a benchmark for measuring the level of community welfare. Community welfare indicators are proxied with the number of poor people. Increasing the welfare of the community will affect the decline in the number of poor people, thus impacting the efficient fiscal performance. This study aims to measure performance in districts/cities in the province of East Java by using the approach of Stochastic Frontier Approach (SFA). Then from the analysis. By using factors that allegedly affect the value of fiscal performance efficiency.

The results obtained by using the SFA approach show that the average level of efficient fiscal performance of regencies/cities in East Java Province in 2011-2015 did not achieve a perfect efficiency value. Then the result of panel data regression shows that simultaneously the variable of population, GRDP, and education have an effect on the efficiency of fiscal performance. While the partial variable of the number of residents have a positive effect on the efficiency of fiscal performance. Then the GRDP variable has a negative effect on the efficiency of fiscal performance. And educational variables do not affect the efficiency of fiscal performance.

Keywords: Fiscal performance, efficient, population, GRDP and education.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diyakini sebagai perubahan paradigma di dalam sistem pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan peran serta masyarakat (Kuncoro, 2013: 282). Desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki kekuatan, diskresi dan kewenangan yang besar dalam mengelola sumber daya daerah yang dimilikinya. Dalam kaitannya dengan gagasan tentang pentingnya kemampuan pemerintah daerah dan kesanggupan untuk melaksanakan otonomi daerah, kegagalan pelaksanaan otonomi daerah di negara-negara berkembang menjadi tantangan besar bagi pewaris pemerintahan sentralistik yang dituntut untuk dapat melakukan manajemen terhadap sumber-sumber penerimaannya (Said, 2008: 61).

Manajemen keuangan pemerintah menurut Halim (2014: 117) lebih berfokus pada bagaimana pemerintah mendapatkan dana dan bagaimana pemerintah mengalokasikan dana tersebut (*how to get fund and how to allocate the fund*). Di samping itu, pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kepentingan publik (*public oriented*). Salah satu pertimbangan dari penerapan desentralisasi fiskal menurut perspektif kepentingan ekonomi adalah sebagai upaya menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik. efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dianggarkan dengan

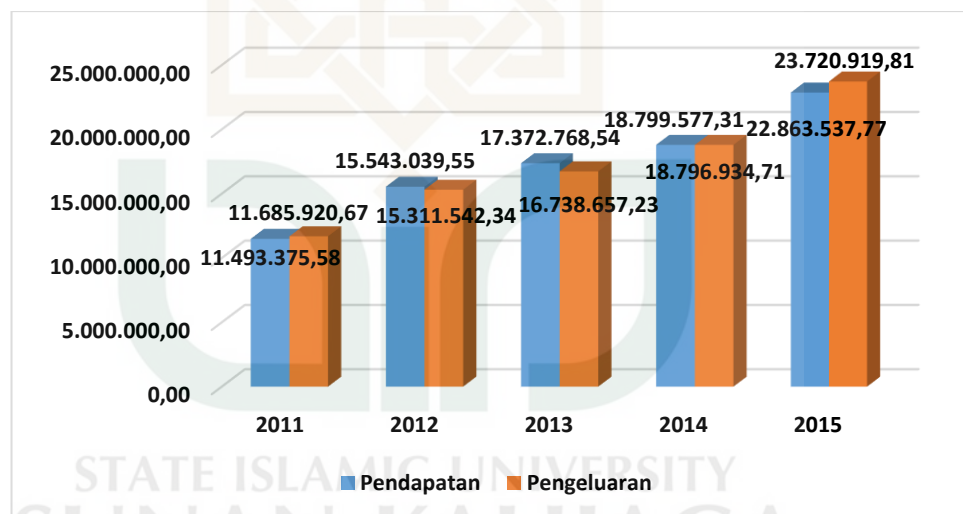
realisasi yang diterima. Jika realisasi biaya lebih rendah dibandingkan biaya yang dianggarkan, maka kinerja pemerintah dinilai mampu melakukan efisiensi. Sebaliknya, jika realisasi biaya lebih tinggi dibandingkan biaya yang dianggarkan, maka kinerja pemerintah dinilai kurang baik karena dimungkinkan terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010: 107)

Menurut Halim (2007) untuk menganalisis keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dilakukan dengan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan dan membelanjakan pendapatan daerah, mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Dikatakan efisien apabila kebijakan pemerintah lebih baik dan memperhatikan pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sejauh mungkin (Noor, 2015: 148).

Kebanyakan ahli ekonomi menggunakan efisiensi Pareto, sebagai tujuan efisiensi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah. sebuah kondisi di mana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi (*better off*) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang lain (*worse off*). Dengan kata lain, kondisi pareto terjadi ketika semua pelaku ekonomi dalam kondisi kesejahteraan yang optimum. Sehingga, pengukuran

kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran.

Salah satu daerah yang memiliki nominal APBD yang cukup tinggi adalah Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana diketahui bahwa Jawa Timur merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Hal ini menjadikan Jawa Timur menjadi salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Karena ini pula, APBD di Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan cukup tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Berikut adalah realisasi APBD yang diambil dari data Badan Pusat Statistik di Provinsi Jawa Timur:



Grafik 1.1 Perkembangan Realisasi APBD di Provinsi Jawa Timur 2011-2015 (Juta Rupiah)

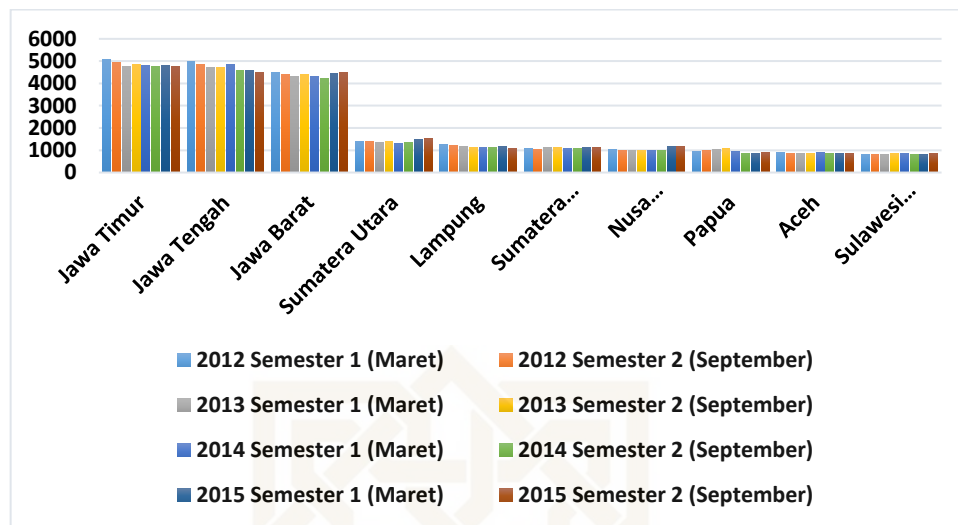
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan bahwa realisasi APBD tahun 2011-2015 di Provinsi Jawa Timur mengalami *trend* kenaikan setiap tahunnya. Baik dari sisi total pendapatan maupun belanja daerah. Seiring dengan adanya peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah di Jawa Timur juga mengalami peningkatan. Hal ini diasumsikan bahwa semakin besar pendapatan

maka semakin besar juga alokasi dana pengeluaran untuk pembangunan daerah. Semakin besar alokasi untuk pembangunan, maka akan semakin besar pula capaian tujuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila APBD meningkat sementara tingkat kemiskinan tidak berkurang dan pelayanan publik juga tidak meningkat, artinya peningkatan APBD tersebut cenderung merupakan pemborosan dan tidak berkontribusi bagi ekonomi publik (Noor, 2015: 81)

Menurut Winarso (2017) capaian pendapatan masing-masing daerah, sangat dimungkinkan terjadi disparitas yang tidak hanya dialami di daerah Provinsi Jawa Timur melainkan pada daerah lain di Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena masing-masing daerah memiliki sumber pemasukan pendapatan dari sektor daerah masing-masing yang berbeda menurut potensi dan faktor lain seperti bagaimana sistem pengelolaan pendapatan daerah dalam pengalokasiannya untuk pengeluaran sebagai *input* yang menghasilkan pembangunan ekonomi daerah.

Di sisi lain, dalam pembangunan ekonomi sangat erat hubungannya dengan masalah kemiskinan. Sebab tujuan utama dari pembangunan adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat atau pemerataan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan dan program yang ditentukan (Pujoalwanto, 2014: 16). Namun demikian, meski pendapatan dan belanja daerah setiap tahun mengalami peningkatan, hal tersebut tidak diimbangi dengan perkembangan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.



Grafik 1.2 Presentase Penduduk Miskin Tertinggi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Atau dengan kata lain kebijakan desentralisasi fiskal masih belum mampu menyelesaikan secara tuntas masalah kemiskinan. Terkait dengan Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada gambar 1.2 dilihat bahwa Provinsi Jawa Timur berada pada urutan pertama provinsi yang menyumbang angka kemiskinan terbanyak di Indonesia, yaitu sekitar 4.789.000 penduduk miskin. Lebih dari 3.2 juta penduduk berada di pedesaan dan 1.5 juta di kota-kota besar dengan batas penghasilan per bulan berada di angka Rp 318.000. Menurut Suandi (2014: 8.6) hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan anggaran antar daerah yang diperkuat oleh sistem dan strategi alokasi yang tidak seimbang. Namun demikian Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang selalu mendapatkan porsi anggaran besar karena sistem dan alokasi anggarannya tidak pernah berubah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vera (2013) menunjukkan bahwa kebijakan kapasitas fiskal daerah akan berdampak pada percepatan pengentasan kemiskinan dibandingkan kebijakan transfer fiskal, karena lebih memihak pada mayoritas penduduk miskin, yaitu rumah tangga pertanian. Selain itu, Kristiyanto (2017) meneliti bahwa belanja langsung dan belanja tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mampu mempengaruhi jumlah rumah tangga miskin. Namun, apabila belanja langsung mempunyai hubungan yang berlawanan arah, belanja tidak langsung mempunyai hubungan yang searah. Sehingga, apabila belanja langsung mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh penurunan jumlah rumah tangga miskin, sedangkan apabila pemerintah menambah jumlah belanja tidak langsung, maka akan menambah pula jumlah rumah tangga miskin.

Penelitian lain dilakukan oleh Handayani (2017) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan dapat secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan. Hal ini telah diteliti di Kabupaten Jawa Tengah menggunakan data panel dengan model terpilih yaitu pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Selain itu, penelitian Astuti (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup nasional yaitu di Indonesia yang dilakukan berdasarkan data sekunder tahun 2004-2012.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS EFISIENSI KINERJA**

FISKAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR 2011-2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pencapaian efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 berdasarkan hasil analisis metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA)?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan mengukur tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 berdasarkan hasil analisis metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA).
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan penelitian mengenai kondisi dan tingkat efisiensi kinerja fiskal di Jawa Timur.
2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengelola fiskal di Provinsi Jawa Timur yang lebih baik.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan fiskal dalam penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, sistematika penyusunannya terdiri dari V bab, yang masing-masing bab akan dijelaskan secara garis besar, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan; menjelaskan secara umum latar belakang masalah dari kasus yang akan diteliti, isu-isu yang dimunculkan terkait penelitian.

Bab II merupakan bagian landasan teori. Bagian landasan teori ini memuat telaah pustaka yang berisi tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait

kemiskinan serta perbedaan perbedaan penelitian yang akan dilaksanakan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, dibahas juga kerangka teoritik yang berisi teori-teori terkait penelitian. Pada bab kedua ini dibahas pula mengenai hipotesis penelitian.

Bab III merupakan bagian metode penelitian. Bagian ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan meliputi uraian terkait jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, model analisis, dan pengujian hipotesis.

Bab IV merupakan bagian pembahasan. Bagian pembahasan menguraikan atau mendeskripsikan hasil-hasil analisis dari beberapa pengujian yang telah ditentukan serta menyesuaikan antara hipotesis dengan hasil analisis (diterima atau tidaknya suatu hipotesis).

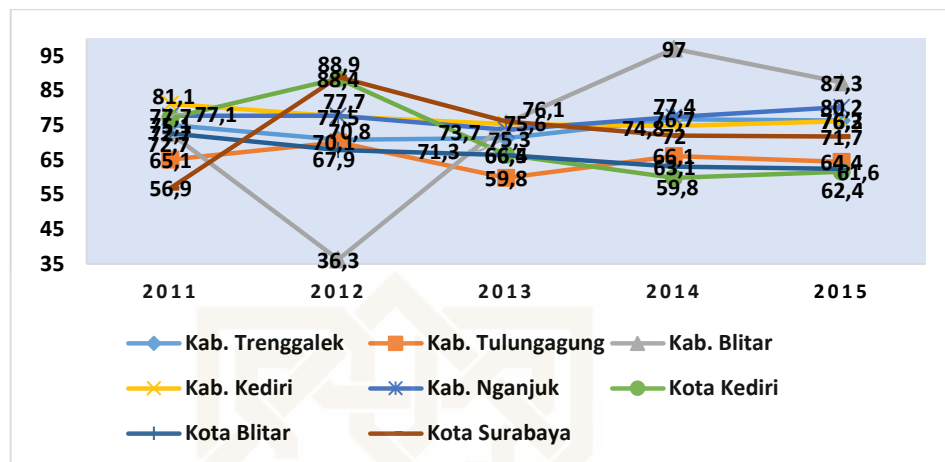
Bab V merupakan bagian penutup. Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang terkait hasil penelitian.

Berdasarkan Grafik 4.5 dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi Eks Karesidenan Madiun selama tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011-2015 tingkat efisiensi Kabupaten Pacitan menunjukkan skor efisiensi kinerja fiskal tertinggi sebesar 72,48%. Sedangkan peningkatan tingkat efisiensi kinerja fiskal terendah adalah Kota Madiun dengan skor efisiensi sebesar 54,94%.

Hal tersebut dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pacitan terus meningkat. Kontribusi tertinggi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah. Sedangkan rendahnya tingkat efisiensi di Kota Madiun disebabkan oleh Serapan APBD yang masih minim. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Madiun mencatat, serapan APBD tahun 2015 baru mencapai Rp 500 miliar atau sekitar 50,57 persen dari kekuatan APBD Kota Madiun yang mencapai sekitar Rp 989 miliar.

Tingkat efisiensi kinerja fiskal di Kabupaten Pacitan dipengaruhi oleh peningkatan PAD yang bersumber dari Rumah Sakit Umum Daerah. Sehingga daerah perlu meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Kabupaten Madiun yang belum mencapai tingkat efisiensi yang cukup baik berdampak penurunan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Madiun perlu meningkatkan realisasi APBD melalui potensi daerahnya agar dapat menyerap APBD yang lebih besar dan dialokasikan dengan optimal.

6. Hasil Analisis Efisiensi Eks Karesidenan Kediri



Grafik 4.6 Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal Eks Karesidenan Kediri

Sumber: *Output Frontier 4.1* yang telah diolah kembali

Berdasarkan Grafik 4.6 di atas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi kinerja fiskal pada Eks Karesidenan Kediri selama periode pengamatan cenderung fluktuatif. Hal ini dapat diamati pada Kabupaten Nganjuk yang mencapai tingkat efisiensi tertinggi, namun *trend* tingkat efisiensinya cenderung fluktuatif dengan skor rata-rata 77,34%. Sedangkan rata-rata dengan efisiensi kinerja fiskal terendah adalah Kabupaten Tulungagung dengan skor efisiensi 65,1%.

Selain itu, meski tidak menempati skor terendah, namun terjadi penurunan drastis tingkat efisiensi kinerja fiskal hingga mencapai sebesar 36,3% di Kabupaten Blitar pada tahun 2012 yang disebabkan oleh porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dibandingkan pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya dengan realisasi sebesar 57.780,07 (juta rupiah).

Tingkat efisiensi kinerja fiskal di Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung belum mencapai skor yang optimal. sehingga perlu meningkatkan alokasi belanja modal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Penurunan tingkat efisiensi kinerja fiskal Kabupaten Blitar yang menurun drastis berpengaruh terhadap anggaran yang kecil. Anggaran yang relatif kecil tersebut menyebabkan alokasi untuk belanja publik juga kecil. Sehingga perlu meningkatkan PAD seperti potensi penerimaan pajak dari pasar ritel atau pasar modern.

Pengukuran tingkat efisiensi menggunakan pendekatan *parametric*, metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum tingkat efisiensi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki *trend* yang fluktuatif selama periode pengamatan. Secara individu, Kabupaten Sampang memiliki tingkat efisiensi rata-rata paling tinggi dengan skor 84,6%, sedangkan Kota Madiun memiliki rata-rata tingkat efisiensi paling rendah dengan skor 54,9%.

Tabel 4.5 Rata-rata Efisiensi Kinerja Fiskal pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Periode					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Kab. Pacitan	77,6	78,4	72,1	67,4	66,9	72,48
2	Kab. Ponorogo	69,9	63,7	66,8	63,4	63,9	65,54
3	Kab. Trenggalek	75,1	70,8	71,3	76,7	76,3	74,04
4	Kab. Tulungagung	65,1	70,1	59,8	66,1	64,4	65,1
5	Kab. Blitar	72,7	36,3	75,6	97,0	87,3	73,78
6	Kab. Kediri	81,1	77,5	75,3	74,8	76,2	76,98
7	Kab. Malang	75,2	76,5	74,7	72,8	74,3	74,7

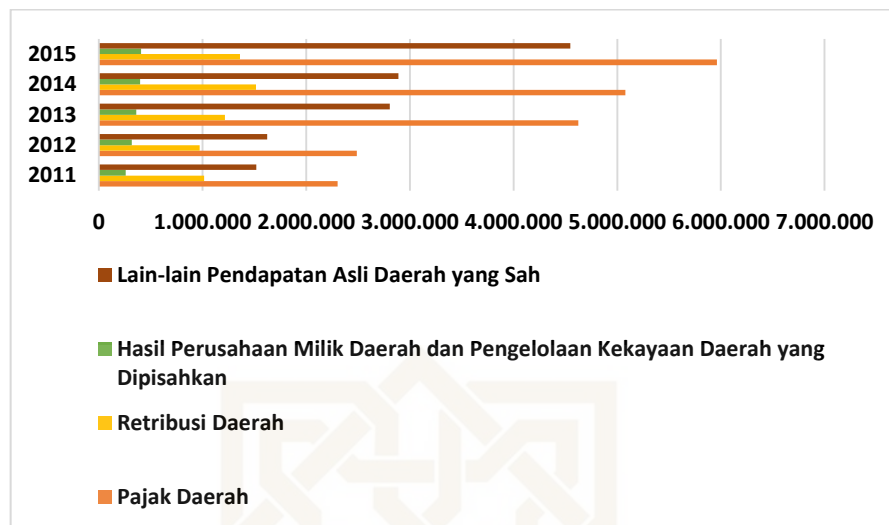
No	Kabupaten/Kota	Periode					Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	
8	Kab. Lumajang	78,1	79,1	74,2	72,5	72,2	75,22
9	Kab. Jember	76,2	79,2	76,1	74,7	74,6	76,16
10	Kab. Banyuwangi	74,3	74,8	71,3	71,8	72,7	72,98
11	Kab. Bondowoso	78,7	75,9	75,0	73,3	73,7	75,32
12	Kab. Situbondo	78,8	73,5	76,0	72,1	72,7	74,62
13	Kab. Probolinggo	84,4	81,7	81,8	81,5	81,2	82,12
14	Kab. Pasuruan	79,3	72,2	75,3	70,7	74,0	74,3
15	Kab. Sidoarjo	70,5	78,7	72,1	72,5	76,6	74,08
16	Kab. Mojokerto	75,9	76,0	77,4	71,0	75,4	75,14
17	Kab. Jombang	78,6	71,0	73,9	75,2	76,7	75,08
18	Kab. Nganjuk	77,7	77,7	73,7	77,4	80,2	77,34
19	Kab. Madiun	75,8	78,9	71,1	66,5	66,7	71,8
20	Kab. Magetan	71,2	66,3	66,6	65,9	64,8	66,96
21	Kab. Ngawi	75,5	74,1	70,4	70,3	70,4	58,55
22	Kab. Bojonegoro	79,5	82,0	81,3	79,8	83,5	81,22
23	Kab. Tuban	81,6	85,3	80,3	80,0	80,9	81,62
24	Kab. Lamongan	77,5	77,2	75,0	72,4	75,3	75,48
25	Kab. Gresik	79,4	81,9	80,2	77,7	79,8	79,8
26	Kab. Bangkalan	86,2	80,7	83,7	82,6	82,6	83,16
27	Kab. Sampang	86,9	83,0	84,6	83,6	83,2	84,26
28	Kab. Pamekasan	83,1	78,8	79,1	76,1	76,1	78,64
29	Kab. Sumenep	80,2	80,7	78,4	77,4	75,7	78,48
30	Kota Kediri	77,1	88,4	66,5	59,8	61,6	70,68
31	Kota Blitar	72,7	67,9	66,4	63,1	62,4	66,5
32	Kota Malang	74,9	79,3	69,6	67,8	83,9	75,1
33	Kota Probolinggo	84,7	71,5	72,8	69,6	67,9	73,3
34	Kota Pasuruan	75,6	60,2	71,2	70,3	69,2	69,3
35	Kota Mojokerto	73,3	73,9	70,9	70,4	68,8	71,46
36	Kota Madiun	57,3	61,8	54,3	52,4	48,9	54,94
37	Kota Surabaya	56,9	88,9	76,1	72,0	71,7	73,12
38	Kota Batu	71,4	32,1	66,3	64,2	63,1	59,42

Sumber: *Output Frontier 4.1*, data diolah kembali pada lampiran 3

Tabel 4.5 di atas menjelaskan hasil pengukuran rata-rata skor efisiensi pada kabupaten/kota selama periode penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh rata-rata efisiensi teknis sebesar 0,7380. Hal ini menunjukkan bahwa skor efisiensi yang dicapai pemerintah daerah pada kinerja fiskal Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2015 adalah sebesar 73,8%. Sehingga penggunaan faktor-faktor produksi dinilai belum efisien karena < 1 untuk mencapai alokasi *input* yang optimal. Dari potensi produksi dengan faktor-faktor produksi yang digunakan, masih terdapat peluang sebesar 26,2% untuk meningkatkan *input* dan menghasilkan *output* yang maksimal.

D. Analisis Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur Tahun 2011-2015

Berdasarkan capaian hasil rata-rata efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Jawa timur tahun 2011-2015, menunjukkan bahwa APBD meningkat setiap tahunnya, sementara tingkat kesejahteraan masyarakat yang diprosikan jumlah penduduk miskin masih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan APBD tersebut tidak tepat sasaran dan cenderung terjadi pemborosan.



Grafik 4.7 Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, data diolah

Pada tabel 4.7 tersebut dapat diketahui perkembangan realisasi penerimaan PAD tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan pada tiap komponen kecuali dari retribusi daerah. Peningkatan PAD terjadi melalui intensifikasi pemungutan pajak termasuk piutang pajak dengan optimalisasi pelayanan publik dan kontribusi dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meskipun PAD di Provinsi Jawa Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tingkat kemandirian Provinsi di Jawa Timur masih cukup rendah.

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai belanja daerah relatif kecil. Di Jawa Timur proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD rata-rata hanya 13,7%, hanya beberapa daerah saja yang PAD-nya di atas 20%. Menurut Suandi (2014: 8.6) hal ini ditunjukkan dengan adanya ketimpangan anggaran antardaerah yang diperkuat oleh sistem dan

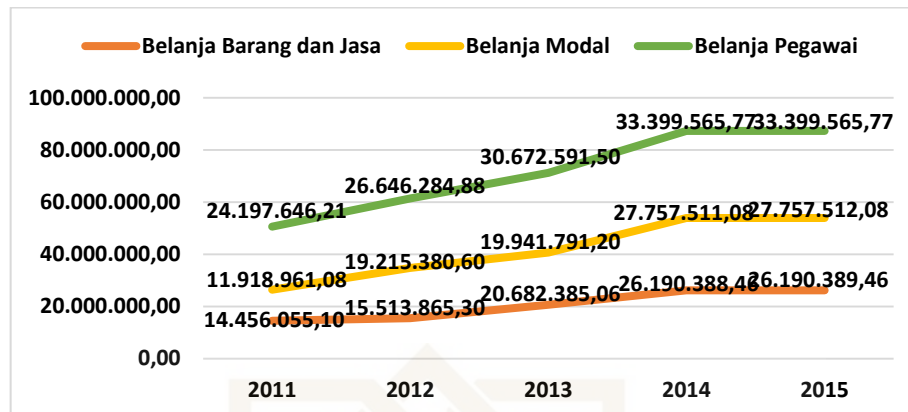
strategi alokasi yang tidak seimbang. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang selalu mendapatkan porsi anggaran besar, karena sistem dan alokasi anggarannya tidak pernah berubah. Sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Jawa Timur belum memiliki kontribusi yang besar dalam membiayai pengeluaran daerah.

Tabel 4.6 Realisasi DAK Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Dana Alokasi Khusus (DAK)
2011	55.031,20
2012	53.490,06
2013	48.047,79
2014	101.875,97
2015	66.039,19

Sumber: Simreg Bappenas, 2017, data diolah

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa sistem transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menunjukkan adanya dominasi pemerintah pusat dalam penetapan jenis-jenis bantuan yang bermanfaat bagi daerah. Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membantu sekolah-sekolah di daerah untuk menyediakan pendidikan bagi masyarakat miskin serta tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkan. Peyerapan DAK di Provinsi Jawa Timur yang relatif kecil belum mampu meng-*cover* kebutuhan daerah secara keseluruhan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan. Hal ini terjadi karena perolehan DAK di Provinsi Jawa Timur yang dinilai semakin kecil pada tahun 2011-2013, kemudian adanya pemangkasan DAK di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 yang penerimaannya sangat kecil jika dibandingkan pada tahun sebelumnya.



Grafik 4.8 Realisasi Belanja Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015

Sumber: Simreg Bappenas, 2017, data diolah

Grafik 4.8 tersebut menunjukkan bahwa realisasi belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Pengalokasian realisasi anggaran belanja pada tahun 2011-2015 untuk belanja pegawai mendapat porsi sebesar 147.799.993,48 (juta rupiah), belanja barang dan jasa sebesar 51.521.574,19 (juta rupiah), dan belanja modal sebesar 53.300.610,52 (juta rupiah). Dari pencapaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *resources* yang sangat terbatas tidak dapat memberikan dampak yang optimum bagi kesejahteraan masyarakat. Kapasitas pemerintahan daerah lebih banyak terfokus pada alokasi belanja pegawai yang mencapai 59%, belanja barang dan jasa sebesar 19%, sedangkan porsi belanja modal hanya berkisar 21% sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik tidak diperhatikan secara baik (Kuncoro, 2013: 243).

E. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Pendidikan terhadap Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal di Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel

Pada tahap pengujian kedua ini, digunakan uji regresi data panel untuk menganalisis dan mengetahui faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi kinerja fiskal seperti pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan sebagai variabel independen (X) terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal sebagai variabel dependen (Y). Adapun hasil pengujian menggunakan bantuan *software Eviews 8* sebagai berikut:

1. Uji Pemilihan Model

a) Hasil Uji *Chow*

Uji *Chow* merupakan pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Hipotesis dari uji ini adalah:

$$H_0 = \text{Common Effect Model}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model}$$

Berdasarkan hasil estimasi *Common Effect* dan *Fixed Effect* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Likelihood

Chi-Square	Statistic	d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	5.136272	(37,149)	0.0000
Kesimpulan :	Prob. < 0.05 Ho ditolak Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik dari Model <i>Common Effect</i>		
$\alpha = 0.05$			

Sumber: *Output Eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 7

Dari hasil regresi Tabel 4.7 di atas, didapatkan nilai probabilitas untuk *Cross-section F* sebesar 0,0000 yang nilainya < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih tepat dibandingkan dengan model *Common Effect*.

b) Hasil Uji Hausman

Hausman Test merupakan pengujian statistik yang dilakukan untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Dimana hipotesisnya adalah:

$$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$$

$$H_a = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Berdasarkan hasil estimasi model *Fixed Effect Model* dan *Random Effect* diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Hausman

Chi-Square	Statistic	Chi-Square d.f	Prob.
<i>Cross-section F</i>	20.496077	3	0.0001
Kesimpulan :	Prob. < 0.05 Ha ditolak Model <i>Fixed Effect</i> lebih baik dari Model <i>Random Effect</i>		
$\alpha = 0.05$			

Sumber: *Output Eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 8

Dari hasil estimasi Tabel 4.8 di atas, didapatkan nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0.0001 yang nilainya < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Random Effect*.

Dari dua uji pemilihan model di atas didapatkan hasil bahwa dari *uji chow test* terpilih model *Fixed Effect* daripada *Common Effect*, dan dari *uji hausman test* terpilih model *Fixed Effect* daripada *Random Effect*, sehingga tidak perlu dilakukan uji selanjutnya yaitu Uji *Lagrange Multiplier* (LM Test).

2) Hasil Estimasi *Fixed Effect Model*

Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yakni jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan

terhadap variabel dependen yakni tingkat efisiensi kinerja fiskal. Berikut adalah hasil estimasi dari model terpilih yakni *Fixed Effect Model*.

Tabel 4.9 Hasil Estimasi Model Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Efisiensi Kinerja Fiskal

	Coefficient	Probability	Kesimpulan
C	2.461857	0.0000	Signifikan
PENDUDUK	7.32E-07	0.0546	Signifikan
PDRB	-0.240961	0.0002	Signifikan
PENDIDIKAN	-0.012788	0.5997	Tidak Signifikan
R-Squared	0.693187		
F-statistik	8.415940		
Prob (F-statistik)	0.000000		

Sumber: *Output software eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 5

Berdasarkan hasil Uji *Likelihood*, Uji dan *Hausman* pada tabel 4.7 dan tabel 4.8, terpilih model yang terbaik yaitu model *Fixed Effect* sebagai model estimasi untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal. Adapun model persamaannya yakni sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efisiensi} = & 2,461859 + 0,000000732 \text{ Jumlah penduduk} - \\
 & 0.240961 \text{ PDRB} - 0.012788 \text{ Pendidikan} \quad (4.1)
 \end{aligned}$$

Dari hasil persamaan 4.9 tersebut, maka dapat diinterpretasikan secara ekonomi sebagai berikut:

- a) Persamaan regresi linear berganda di atas diketahui mempunyai konstanta sebesar 2,461859. Hal ini menunjukkan bahwa jika besaran variabel-variabel independen yakni jumlah penduduk, PDRB dan

pendidikan sama dengan nol, maka variabel dependen efisiensi kinerja fiskal adalah sebesar 2,461859 persen.

- b) Nilai koefisien dari jumlah penduduk sebesar 0,000000732 dengan probabilitas 0.0546. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur. Apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 jiwa, maka efisiensi kinerja fiskal akan naik sebesar 0,000000732 persen. Sehingga berdampak pada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c) Nilai koefisien dari PDRB sebesar -0.240961 dengan probabilitas 0.0002. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur. Apabila PDRB naik sebesar 1 milyar rupiah, maka efisiensi kinerja fiskal akan turun sebesar 0.240961 persen. Sehingga peningkatan PDRB tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Nilai koefisien dari pendidikan sebesar -0.012788 dengan probabilitas sebesar 0.5997. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan kabupaten/kota di Jawa Timur tidak berpengaruh terhadap efisiensi kinerja fiskal.

3) Pengujian Hipotesis

- a) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) dalam uji ini adalah secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan (H_a) dalam uji ini adalah secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 4.10 Hasil Uji F

Sum of Square	Df	Mean Square	F-Stat	Prob
0.322971	3	0.737024	8.415940	0.0000

Sumber: *output Eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 5

Hipotesis nol (H_0) ditolak ketika nilai probabilitas (*F-Statistic*) $< 0,05$ begitu pula sebaliknya. Hasil Uji F pada Tabel 4.7 di atas diperoleh nilai probabilitas (*F-Statistic*) sebesar $0,000000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Artinya, variabel jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi tingkat efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Jawa Timur pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$).

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan variabel independen secara simultan dalam menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R-Square	Adjusted R-Square
1	0.693187	0.610821

Sumber: *output Eviews 8* data diolah kembali pada lampiran 6

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas diketahui nilai koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0.693187. Artinya, variabel independen (jumlah penduduk, PDRB dan pendidikan) mampu menjelaskan variabel dependen (tingkat efisiensi kinerja fiskal) sebesar 69,31% dan sisanya sebesar 30,69% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

c) Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependennya. Derajat kepercayaan yang digunakan untuk penelitian sosial sebesar 95% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima. Hal ini menandakan bahwa variabel independen secara parsial/individu dapat berpengaruh terhadap variabel dependennya.

1) Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal

Pada Tabel 4.9 diatas, diketahui untuk jumlah penduduk, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,000000732 dengan nilai signifikansi sebesar 0.0546. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk menunjukkan *slope* positif dan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja fiskal. Penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Norfridwitya (2006) yang menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian. Artinya, meningkatnya jumlah penduduk dapat berpengaruh positif terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Keynesian yang berpandangan bahwa kenaikan jumlah penduduk, maka akan diiringi adanya kemajuan, meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja. Sehingga, keterlibatan penduduk dalam efisiensi kinerja fiskal suatu daerah sangat tinggi, penambahan jumlah penduduk diduga merupakan salah satu hal yang dibutuhkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat, juga akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan masyarakat sehingga memberikan dampak yang positif juga untuk pendapatan daerah, karena adanya sumbangan pajak yang lebih besar dari penduduk ke pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah, maka alokasi belanja daerah juga akan meningkat. Porsi belanja daerah yang lebih besar akan memberikan dampak pada efisiensi kinerja fiskal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Pengaruh PDRB Terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal

Pada Tabel 4.9 di atas diketahui untuk variabel PDRB diperoleh koefisien regresi sebesar -0.240961 dengan nilai signifikansi sebesar $0,0002$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal. Dengan demikian asumsi dari hasil tersebut adalah peningkatan PDRB dapat saja terjadi tanpa memberikan dampak positif terhadap efisiensi kinerja fiskal dan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai akibat daripada tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan PDRB.

Penelitian ini bertolak belakang dengan teori Adolf Wagner (dalam Mangkoesobroto, 2010) yang menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Sebab, keberhasilan dalam pembangunan menjadi modal penting suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat. Semakin banyaknya pilihan konsumsi barang dan jasa bagi masyarakat menunjukkan masyarakat semakin sejahtera. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan

oleh Linda (2014) yang menemukan bahwa adanya keterkaitan antara PRDB dan pengeluaran pemerintah pada berbagai sektor ekonomi. Dapat dikatakan bahwa ketika perekonomian suatu daerah mengalami peningkatan maka kesejahteraan masyarakat meningkatkan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Muana Nanga (2006) yang menyimpulkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja fiskal. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Woyanti (2018) yang menunjukkan hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, peningkatan PDRB tidak serta merta menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga peningkatan PDRB memberikan dampak negatif pada efisiensi kinerja fiskal.

Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur dialami oleh sebagian besar penduduk pedesaan daripada perkotaan. Hal tersebut merupakan salah satu pertanda masih senjangnya pembangunan antara desa dan kota. Sedangkan fakta menunjukkan bahwa mayoritas penduduk miskin yang tinggal di pedesaan umumnya bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan tabel 4.12 di bawah menunjukkan bahwa PDRB justru

menurunkan tingkat efisiensi kinerja fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di pedesaan.

Tabel 4.12 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010

Kategori	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian	4.02	5.14	3.06	3.54	3.29
Perdagangan	9.16	8.21	6.21	5.01	5.55
Hotel dan Restoran	9.70	5.68	5.65	8.88	7.72
Jasa Asuransi	9.14	10.71	13.80	6.76	7.19
Jasa Perusahaan	4.92	3.19	7.45	8.52	5.44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Meskipun secara struktur ekonomi Jawa Timur masih menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu dari tiga sektor utama, namun pertumbuhan sektor pertanian rata-rata paling rendah dibandingkan pertumbuhan seluruh sektor lain. Sementara sektor lain seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, keuangan dan sewa dan jasa perusahaan sangat mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Artinya, jika pertumbuhan pada sektor-sektor tersebut bagus, tidak lantas bisa disimpulkan bahwa peran kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan fiskal telah optimal. Karena peningkatan PDRB yang cenderung lebih besar pada sektor nonpertanian mengakibatkan penerapan desentralisasi fiskal tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Pengaruh Pendidikan terhadap Efisiensi Kinerja Fiskal

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas diperoleh nilai koefisien regresi sebesar -0.012788 dengan nilai signifikansi sebesar 0.5997. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi tingkat efisiensi kinerja fiskal di Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan pada tingkat efisiensi tidak disebabkan karena adanya kenaikan pada variabel pendidikan. Penelitian ini bertentangan dengan teori *human capital*. Menurut Dicky Djatnika (2009: 8) kemiskinan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh seseorang. Namun pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamula (2012) yang menyatakan bahwa tidak selamanya provinsi dengan proporsi pengeluaran pemerintah pada sektor publik yang tinggi menghasilkan skor kinerja dan efisiensi sektor publik yang tinggi pula.

**Tabel 4.13 Rata-Rata Lama Sekolah di Jawa Timur
Tahun 2011-2015**

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah
2011	6.79
2012	6.82
2013	6.90
2014	7.05
2015	7.14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Selama 2011-2015 terjadi sedikit sekali peningkatan kualitas penduduk yaitu dari 6,79 tahun ditahun 2011, meningkat

menjadi 7,14 ditahun 2015. Walaupun terjadi peningkatan sebesar 0,35 poin persen selama lima periode, namun presentase tersebut didominasi oleh rata-rata lama sekolah yang setara dengan SLTP. Sehingga hal ini diasumsikan bahwa pendidikan di Jawa Timur tidak memberikan dampak terhadap peningkatan capaian pendidikan karena pembangunan pendidikan yang terjadi belum mampu menuntaskan program wajar Dikdas 12 tahun (setara SLTA) yang siap memasuki dunia kerja.

Tabel 4.13 di atas mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada bidang pendidikan belum tepat dan optimal sehingga tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan efisiensi kinerja fiskal. Seseorang yang berpendidikan tinggi cenderung memperoleh kesempatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang memiliki pendidikan rendah. Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan memiliki keterampilan yang lebih banyak daripada orang yang memiliki pendidikan rendah sehingga memungkinkan seseorang untuk mendapat penghasilan yang lebih besar.

F. Pandangan Islam terhadap Hasil Penelitian

Apabila produksi *basic need/dlaruriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan

mereka telah terpenuhi (Fauzia, dkk, 2014: 123). Kaidah Islam dalam memandang efisiensi meyakini bahwa untuk mewujudkan tingkat *output* yang optimal, maka diperlukan usaha yang optimal pula dengan tetap berada dalam jalan kebenaran. Tanggungjawab manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah mengelola *resources* yang telah disediakan oleh Allah secara efisien dan optimal agar kesejahteraan dan keadilan dapat ditegakkan. Yang harus dihindari oleh manusia adalah mengabaikan *negative externalities*. Maka tanggungjawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus dilakukan secara efisien dan optimal.

Manusia dituntut oleh Allah untuk memanfaatkan segala nikmat yang ada dengan baik dan benar serta tidak lupa mensyukuri-Nya. Dalam hal pengelolaan fiskal, penentuan *input* dan *output* dari produksi harus sesuai dengan hukum Islam dan tidak mengarah kepada kerusakan. Tujuan produksi dalam Islam adalah membawa kemaslahatan bagi manusia dengan cara pengelolaan dan pemanfaatan segala sumber daya dengan sebaik-baiknya. Sehingga upaya pemerintah dalam pengelolaan fiskal harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal agar tidak berdampak pada kemubadziran dan dapat mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut salah satu nasihat Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rasyid, yang didasarkan pada hadits dalam Chapra (2001:60) pengelolaan dana harus dilakukan secara efektif dan efisien. Tentunya harus menghindari hal-hal yang tidak berguna, yang disebut dengan *mubadzir*. Kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur belum mencapai pada tingkat efisien karena belum memberikan

dampak pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga diindikasikan adanya pemborosan alokasi anggaran yang tidak memihak pada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada analisis tingkat efisiensi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode *Stochastic Frontier Approach* (SFA) pada periode 2011-2015 didapatkan hasil bahwa secara umum tingkat efisiensi kinerja fiskal 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tersebut memiliki trend yang fluktuatif. Secara individu, Kabupaten Sampang memiliki tingkat efisiensi rata-rata paling tinggi dengan skor 84,6%, sedangkan Kota Madiun memiliki rata-rata tingkat efisiensi paling rendah dengan skor 54,9%. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi kinerja fiskal di Jawa Timur selama tahun 2011-2015 belum efisien dengan skor 73.8%.
2. Berdasarkan regresi data panel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan regresi panel. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk, maka tingkat efisiensi kinerja fiskal akan semakin tinggi.
3. Berdasarkan regresi data panel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan regresi panel. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PDRB, maka tingkat efisiensi kinerja fiskal akan semakin rendah.

4. Berdasarkan regresi data panel pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan regresi panel. Ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi kinerja fiskal.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah yang belum mencapai tingkat efisiensi perlu melakukan perbaikan pada *input* maupun *output*-nya. Dari sisi *input*, disarankan pengeluaran yang dilakukan lebih hati-hati agar tidak terjadi pemborosan ataupun inefisiensi. Sedangkan dari sisi *output*, perbaikan dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah *output* demi mencapai efisiensi. Hal ini ditunjukkan terutama pada wilayah-wilayah yang tingkat efisiensinya sangat rendah.
2. Pemerintah perlu mengoptimalkan kinerjanya dalam mengalokasikan belanjanya. Dengan melakukan perbaikan terhadap efisiensi sektor publik dan memberikan prioritas terhadap sektor yang produktif. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan wewenangnya untuk mengalokasikan anggarannya dengan lebih cermat, efektif dan efisien. Pemerintah daerah diharapkan dapat sedemikian rupa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam rangka penggunaan dana.

3. Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur hendaknya pemerintah daerah Jawa Timur lebih meningkatkan program pembangunan yang menitik beratkan pada bidang pendidikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qhardawy, Syekh Muhammad Yusuf. (1996). *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*. Terjemahan Umar Fanani. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset.
- Amelia, R. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga
- Bastian, Indra. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Chusnah, Saidatul 2014. *Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah*. Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang
- Coe, Charles K. 1989. *Public Financial Management*. New Jersey: Prentice Hall
- Coelli T.J, et.al. 2005. *An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition*. New York: Springer Science + Business Media, Inc.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: INDEKS
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta Barat: PT Indeks
- Faturrohim, Rahmawati. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf terhadap Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Fauzia, Ika Yunia & Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: KENCANA
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. 2006. *Runtuhnya Sistem Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Gujarati., & Porter. 2009. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat

- Halim, Abdul, dkk. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Hamid, Edy Suandi. 2005. *Formula Alternatif DAU: Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. 2009. *Hubungan dan masalah keagenan di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2 (1): 53-64
- Hamid, Edy Suandi. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Banten: Universitas Terbuka
- Henley. 1992. *Public Sector Accounting and Financial Control*. London: Chapman & Hall
- Kristiyanto, Sony, dkk. 2017. *Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan*. *Jurnal*. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- Kuncoro, Mudrajad. 2014. *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Kurnia, Akhmad Syakir. *Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi Universitas diponegoro Semarang
- Lisna, Vera, dkk. 2013. *Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Pascasarjana IPB
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET
- Nanga, Muana. 2006. *Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana IPB
- Noor, Henry Faizal. 2015. *Ekonomi Publik*. Jakarta: PT Indeks
- Nugroho, Muhammad Rudi, Muhammad Abdul Qoyyum, Rizqi Umar Al Hashfi, dan Ahmad Syarif. 2015. *Modul Praktikum Ekonometrika*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- Pamula, Yanitra Ega 2012. *Efisiensi Sektor Publik: Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 201-2008*. Jurnal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Said, M. Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Sebayang, Asnita Frida. 2005. *Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah di Indonesia Pasca Krisis*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Islam Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2007. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: KENCANA
- Sumarsono, Sonny. 2009. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Whittaker, James B. 1995. *The Government Performance and Result Act of 1993: A Mandate for Strategic Planning and Performance Measurement*, Educational Services Institut: Arlington, Virginia
- Widodo, Adi, dkk. (2011). *Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengetasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah*. Jurnal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Penelitian *Input dan Output*

Kabupaten/Kota	Tahun	Miskin	PAD	DAK	BTL	BL
Kab. Pacitan	2011	98700	48.359,92	54.055,90	570.148,80	277.504,78
	2012	94500	62.836,21	51.724,73	673.652,37	533.822,53
	2013	91700	62.952,49	51.937,52	724.455,20	312.034,38
	2014	88900	101.276,94	51.869,86	818.456,16	292.292,72
	2015	92100	126.449,07	61.844,07	818.456,16	292.292,72
Kab. Ponorogo	2011	105900	65.936,67	74.774,90	771.037,36	289.754,34
	2012	101400	119.657,07	62.386,74	1.181.087,90	555.006,94
	2013	103000	134.097,32	65.307,55	974.051,02	422.863,64
	2014	99900	198.730,42	65.691,47	1.132.639,00	514.008,21
	2015	103200	210.695,34	66.118,27	1.132.639,00	514.008,21
Kab. Trenggalek	2011	101200	63.084,03	61.768,10	643.847,53	294.469,99
	2012	96900	77.035,61	53.829,88	894.339,95	472.511,38
	2013	92800	77.799,52	64.974,66	774.782,53	390.051,96
	2014	90000	132.951,06	61.684,69	673.293,29	516.009,60
	2015	92200	155.254,33	70.873,86	673.293,29	516.009,60
Kab. Tulungagung	2011	98700	124.517,80	80.751,10	903.485,75	345.493,61
	2012	94600	162.161,67	68.674,42	975.977,95	703.653,23
	2013	91700	174.981,71	71.687,64	1.178.081,28	502.251,08
	2014	89000	276.577,97	73.752,10	996.971,44	586.453,40
	2015	87400	309.646,33	90.583,14	996.971,44	586.453,40
Kab. Blitar	2011	126900	76.190,96	89.971,90	796.069,96	362.369,10
	2012	121600	95.782,15	68.085,94	653.912,60	331.938,66
	2013	120300	115.670,86	70.322,56	1.091.763,80	545.488,26
	2014	116700	188.827,43	71.417,13	1.161.249,53	633.718,91
	2015	114100	216.648,25	73.648,36	1.161.249,53	633.718,91
Kab. Kediri	2011	218100	96.834,58	47.492,90	876.370,82	457.888,89
	2012	209000	325.314,64	102.056,87	930.693,47	544.014,64
	2013	202700	194.826,50	69.281,81	1.079.425,11	516.019,37
	2014	196800	295.295,34	68.479,34	1.252.383,58	800.453,05
	2015	199400	314.229,57	53.045,27	1.252.383,58	800.453,05
Kab. Malang	2011	287400	172.333,34	108.468,20	1.252.384,20	582.152,71
	2012	275500	211.617,94	118.237,36	1.279.517,96	835.993,18
	2013	288600	260.582,63	112.312,35	1.491.521,60	948.987,79
	2014	280300	411.185,10	130.050,58	1.649.112,59	1.185.344,66
	2015	292900	424.938,75	108.187,80	1.649.112,59	1.185.344,66
Kab. Lumajang	2011	131900	84.336,95	48.912,90	685.093,03	309.933,45
	2012	126400	117.508,37	48.874,36	755.843,01	518.090,31

	2013	124400	112.406,82	44.000,68	860.621,95	376.628,91
	2014	120700	194.076,10	69.257,83	961.926,36	599.681,93
	2015	118500	212.585,09	69.873,48	961.926,36	599.681,93
Kab. Jember	2011	292100	182.797,34	99.597,20	1.215.387,17	569.446,30
	2012	280000	255.804,77	157.273,64	950.901,03	601.176,98
	2013	278500	308.376,58	74.410,89	1.457.193,20	890.049,31
	2014	270400	460.926,57	87.951,09	1.604.656,04	1.155.680,88
	2015	269500	508.051,02	88.174,83	1.604.656,04	1.155.680,88
Kab. Banyuwangi	2011	164000	113.364,55	81.911,90	956.935,15	486.076,54
	2012	157200	139.514,58	67.656,19	949.730,11	482.875,70
	2013	152200	183.235,88	76.997,76	1.179.565,58	706.743,49
	2014	147700	283.488,70	64.053,64	1.290.196,47	931.748,98
	2015	146000	346.992,33	51.561,10	1.290.196,47	931.748,98
Kab. Bondowoso	2011	123600	66.816,39	66.936,00	618.371,25	332.586,91
	2012	118500	87.053,51	65.417,78	748.494,64	417.007,15
	2013	115300	79.559,72	80.710,60	776.251,18	490.054,01
	2014	111900	134.684,70	91.063,07	830.961,72	559.220,23
	2015	113700	158.974,21	87.710,95	830.961,72	559.220,23
Kab. Situbondo	2011	98600	61.761,29	60.942,30	537.877,83	300.711,43
	2012	94500	67.050,48	66.718,40	685.809,37	343.583,97
	2013	90300	78.043,41	81.427,29	654.029,66	496.073,41
	2014	87700	129.640,57	92.072,04	781.330,02	599.987,97
	2015	91200	148.507,95	89.740,80	781.330,02	599.987,97
Kab. Probolinggo	2011	259200	75.654,86	75.520,40	685.297,94	427.304,28
	2012	248500	90.009,45	76.672,76	723.008,92	313.609,76
	2013	238700	108.511,36	62.235,42	846.471,15	482.939,43
	2014	231900	195.263,62	69.707,43	921.947,27	666.276,01
	2015	237000	207.370,34	78.887,94	921.947,27	666.276,01
Kab. Pasuruan	2011	186700	143.862,84	75.424,20	887.324,06	602.635,65
	2012	179100	194.858,67	66.236,31	1.345.199,42	812.229,86
	2013	175700	278.165,17	77.421,87	1.063.924,25	675.321,57
	2014	170700	296.721,49	83.588,34	1.338.787,86	851.834,22
	2015	169200	421.442,63	42.080,82	1.338.787,86	851.834,22
Kab. Sidoarjo	2011	136300	484.313,74	59.774,50	1.165.962,88	662.794,51
	2012	130500	669.617,55	63.877,47	699.551,99	465.940,26
	2013	138200	858.433,67	36.075,60	1.450.646,69	1.119.170,31
	2014	133800	1.115.332,93	78.469,81	1.337.268,32	1.560.552,36
	2015	136100	1.266.786,72	34.658,71	1.337.268,32	1.560.552,36
Kab. Mojokerto	2011	117500	108.709,41	57.903,90	713.283,89	345.476,48
	2012	112700	219.013,23	50.645,61	768.760,74	438.941,94
	2013	116600	219.150,02	35.577,55	858.705,67	573.863,16
	2014	113300	357.924,99	55.556,66	1.069.357,54	692.976,11
	2015	113900	414.965,86	23.095,25	1.069.357,54	692.976,11

Kab. Jombang	2011	156000	124.799,22	43.069,40	785.048,38	358.389,97
	2012	149600	164.389,35	94.467,88	833.685,48	279.045,96
	2013	137500	185.091,68	43.717,04	1.026.658,38	532.388,68
	2014	133500	304.065,30	47.292,08	1.059.721,05	762.131,16
	2015	133800	363.963,52	33.118,97	1.059.721,05	762.131,16
Kab. Nganjuk	2011	142100	94.553,24	46.303,65	771.220,09	356.001,90
	2012	136100	125.173,39	58.366,86	640.754,64	257.526,25
	2013	140800	153.130,77	59.433,92	975.835,85	511.061,55
	2014	136500	255.880,47	67.785,29	892.744,41	732.572,25
	2015	132000	287.881,05	29.852,04	892.744,41	732.572,25
Kab. Madiun	2011	95800	57.998,22	53.121,90	604.637,98	268.079,92
	2012	91800	56.161,28	49.168,36	633.911,93	487.065,16
	2013	83700	83.428,64	51.129,00	763.810,72	377.186,08
	2014	81200	134.584,34	62.841,12	878.549,94	430.557,92
	2015	84700	149.628,35	67.703,66	878.549,94	430.557,92
Kab. Magetan	2011	75000	61.996,14	56.660,80	656.149,46	304.469,64
	2012	71800	152.010,25	54.252,59	960.951,05	620.815,37
	2013	76300	87.859,71	46.164,37	841.556,58	347.097,78
	2014	74000	141.162,94	58.964,98	905.060,21	498.436,32
	2015	71200	164.564,89	63.134,87	905.060,21	498.436,32
Kab. Ngawi	2011	137800	61.539,12	69.759,80	750.351,13	328.177,98
	2012	131700	77.381,70	63.804,47	845.267,22	394.995,84
	2013	127500	87.081,65	71.219,84	946.839,62	408.487,60
	2014	123200	169.237,01	65.997,05	994.267,26	485.037,70
	2015	129300	191.166,21	72.847,17	994.267,26	485.037,70
Kab. Bojonegoro	2011	212900	164.585,99	67.916,90	858.012,45	430.211,82
	2012	203900	159.247,61	68.347,17	766.537,83	510.381,34
	2013	196800	215.766,16	46.545,62	1.050.487,20	983.632,99
	2014	190900	291.244,90	59.399,17	1.160.890,35	1.257.503,56
	2015	194000	337.695,82	19.046,57	1.160.890,35	1.257.503,56
Kab. Tuban	2011	211500	137.296,86	66.425,80	730.241,58	383.317,00
	2012	202700	192.499,44	49.806,83	597.674,19	427.046,75
	2013	196900	227.120,52	49.173,77	919.459,85	570.368,09
	2014	191100	291.079,94	48.566,93	987.408,96	704.837,04
	2015	196600	345.965,62	39.855,74	987.408,96	704.837,04
Kab. Lamongan	2011	206700	99.545,63	88.252,20	877.170,65	410.803,19
	2012	197900	597.756,02	70.832,24	1.197.847,76	992.052,96
	2013	192000	161.087,92	75.665,88	1.064.722,17	542.061,36
	2014	186100	272.409,28	77.845,00	1.180.066,09	588.311,81
	2015	182600	321.667,13	40.173,95	1.180.066,09	588.311,81
Kab. Gresik	2011	181700	274.033,17	46.338,70	844.913,41	428.053,01
	2012	174400	428.126,28	82.505,06	606.996,96	376.047,46
	2013	171600	502.777,03	49.106,18	992.715,50	904.554,61

	2014	166900	700.587,79	72.051,26	1.098.745,95	1.101.773,82
	2015	170800	842.196,74	43.971,88	1.098.745,95	1.101.773,82
Kab. Bangkalan	2011	239500	65.039,40	88.386,10	583.006,97	526.015,57
	2012	229800	80.268,57	71.355,49	850.881,25	457.189,10
	2013	218300	92.722,42	105.241,40	726.241,46	705.256,11
	2014	212200	135.785,48	98.985,48	802.786,78	772.680,08
	2015	216200	175.624,05	103.508,52	802.786,78	772.680,08
Kab. Sampang	2011	267500	61.065,36	68.533,70	526.591,80	344.293,60
	2012	253400	67.278,00	72.170,45	700.578,71	338.589,19
	2013	248200	66.415,37	105.384,51	629.803,24	455.525,35
	2014	239600	123.039,10	91.197,08	706.350,86	504.762,96
	2015	240400	142.512,55	103.077,15	706.350,86	504.762,96
Kab. Pamekasan	2011	167900	71.054,42	63.850,10	577.141,07	349.126,39
	2012	160800	119.899,65	61.093,88	831.343,27	510.973,74
	2013	153700	89.463,71	97.071,78	706.544,98	461.026,70
	2014	148800	171.518,20	101.518,99	859.175,95	595.483,86
	2015	146900	170.258,93	98.864,33	859.175,95	595.483,86
Kab. Sumenep	2011	242500	57.944,46	67.746,00	800.881,86	307.262,40
	2012	232200	110.502,92	67.924,85	876.660,64	478.223,52
	2013	225500	97.052,07	79.219,77	945.189,28	476.624,17
	2014	218900	162.371,86	63.570,20	1.092.196,90	591.324,74
	2015	216800	172.687,32	90.743,40	1.092.196,90	591.324,74
Kota Kediri	2011	23300	117.491,37	4.525,80	437.772,21	283.912,87
	2012	22300	122.522,87	424,10	267.968,91	214.816,55
	2013	22800	144.562,73	29.999,61	489.841,02	381.638,62
	2014	22100	207.529,19	34.980,32	634.636,40	519.189,81
	2015	23800	314.229,57	31.973,91	634.636,40	519.189,81
Kota Blitar	2011	9500	52.564,08	23.441,80	239.188,47	294.139,72
	2012	9100	54.987,44	17.527,97	271.550,79	231.519,55
	2013	10100	72.739,84	29.707,73	295.326,26	299.268,67
	2014	9800	102.757,90	30.796,88	322.580,46	311.497,39
	2015	10000	216.648,25	34.540,09	322.580,46	311.497,39
Kota Malang	2011	45400	185.818,55	15.578,90	619.127,86	429.180,97
	2012	43500	229.810,29	21.897,31	444.443,02	393.159,26
	2013	41000	317.850,42	30.315,71	749.227,88	737.140,89
	2014	40600	372.545,39	31.304,06	825.928,37	857.741,67
	2015	39100	461.887,70	581,36	825.928,37	857.741,67
Kota Probolinggo	2011	38800	57.476,66	22.574,50	272.082,87	306.693,06
	2012	24300	69.261,48	32.816,17	362.532,59	239.810,58
	2013	19200	78.355,78	32.341,47	335.262,15	320.669,89
	2014	19000	135.062,80	32.644,61	396.285,32	386.961,76
	2015	18700	142.434,72	41.811,63	396.285,32	386.961,76
Kota Pasuruan	2011	15700	45.213,90	15.244,30	262.980,03	191.089,47

	2012	15100	175.985,12	19.058,20	620.366,29	640.705,05
	2013	14600	65.406,70	25.890,58	297.419,73	254.919,26
	2014	14200	100.647,02	28.041,85	335.407,52	367.340,96
	2015	14500	114.734,24	35.847,31	335.407,52	367.340,96
Kota Mojokerto	2011	8300	42.165,06	20.391,20	199.897,07	209.767,85
	2012	8000	48.055,97	15.463,90	219.484,67	268.156,91
	2013	8300	74.944,03	19.389,31	239.654,72	271.436,82
	2014	8000	105.277,49	24.742,07	256.507,25	391.596,84
	2015	7700	129.258,13	29.428,01	256.507,25	391.596,84
Kota Madiun	2011	9700	61.305,08	24.070,50	339.766,22	187.079,85
	2012	9300	72.030,95	20.273,45	291.189,91	171.050,85
	2013	8700	96.059,18	27.544,29	419.457,36	355.677,54
	2014	8500	85.739,77	31.922,30	439.596,35	391.458,30
	2015	8600	164.681,13	53.077,65	439.596,35	391.458,30
Kota Surabaya	2011	183300	1.886.514,30	49.874,62	1.446.358,68	1.354.535,22
	2012	175700	2.279.613,84	53.227,56	311.677,63	286.306,66
	2013	169400	2.791.580,05	29.928,31	1.973.857,73	3.078.333,85
	2014	164400	3.307.323,86	66.182,23	2.208.383,50	4.427.803,01
	2015	165700	4.035.649,47	71.256,90	2.208.383,50	4.427.803,01
Kota Batu	2011	9100	30.241,86	17.583,60	231.780,18	204.076,13
	2012	8700	1.443.395,29	18.244,59	1.711.631,68	2.266.653,85
	2013	9400	59.544,94	23.431,81	292.093,32	279.191,84
	2014	9100	80.493,92	30.351,36	334.980,26	426.045,76
	2015	9400	104.233,58	38.793,24	334.980,26	426.045,76

Lampiran 2: Data Penelitian X dan Y

Kabupaten/Kota	Tahun	EFISIENSI	PENDUDUK	PDRB	PENDIDIKAN
Kab. Pacitan	2011	0,77698	543904	7246,2	6,94
	2012	0,784104	545905	7705	6,96
	2013	0,721844	547917	8157,6	7,01
	2014	0,674762	549481	8582,2	7,27
	2015	0,669145	550986	9019,5	7,37
Kab. Ponorogo	2011	0,699394	859302	9472,2	6,99
	2012	0,637639	861806	10038,4	7,17
	2013	0,668894	863890	10554,5	7,49
	2014	0,634866	865809	11104,5	7,28
	2015	0,639907	867393	11687,9	7,05
Kab. Trenggalek	2011	0,751051	678792	8435,2	7,25
	2012	0,708153	681706	8959,5	7,3
	2013	0,713119	683791	9496,7	7,33
	2014	0,7672	686781	9998,5	7,41

	2015	0,76361	689200	10501,6	7,65
Kab. Tulungagung	2011	0,651153	998707	17845,2	7,84
	2012	0,7015	1004711	18999	7,95
	2013	0,598566	1009411	20164,3	7,79
	2014	0,661081	1015974	21265,2	7,89
	2015	0,644686	1021190	22326,6	8,16
Kab. Blitar	2011	0,727182	1124775	17093,9	7,36
	2012	0,773189	1130423	18054,5	7,4
	2013	0,681766	1136701	18967,3	7,41
	2014	0,670689	1140793	19920,2	7,49
	2015	0,664561	1145396	20925,5	7,64
Kab. Kediri	2011	0,811194	1512610	19354,9	7,69
	2012	0,775432	1521895	20538,3	7,71
	2013	0,753596	1530504	21733,5	7,75
	2014	0,748975	1538929	22890	7,88
	2015	0,762047	1546883	24007,7	7,82
Kab. Malang	2011	0,752076	2471990	44091,3	7,01
	2012	0,765154	2490878	47076	7,07
	2013	0,747332	2508698	49571,7	7,07
	2014	0,728479	2527087	52550,4	7,17
	2015	0,74342	2544315	55317,8	7,24
Kab. Lumajang	2011	0,781708	1013403	15144,4	6,4
	2012	0,791	1017900	16053,4	6,43
	2013	0,742524	1023818	16949,6	6,52
	2014	0,725465	1026378	17851,9	6,62
	2015	0,722109	1030193	18676,9	6,26
Kab. Jember	2011	0,762884	2353025	35208,2	6,73
	2012	0,792751	2367482	37262	6,79
	2013	0,76162	2381400	39519,2	6,8
	2014	0,74717	2394608	41971,7	6,24
	2015	0,74633	2407115	44222,6	6,44
Kab. Banyuwangi	2011	0,743964	1567084	34720,4	6,88
	2012	0,748214	1574528	37235,7	7,25
	2013	0,713915	1582586	39733,6	7,25
	2014	0,718789	1588082	42005,7	7,1
	2015	0,727752	1594083	44529,9	6,99
Kab. Bondowoso	2011	0,787968	743369	9033	5,66
	2012	0,759426	748127	9583,4	5,94
	2013	0,750818	752791	10140,1	5,94
	2014	0,733704	756989	10652,4	5,36
	2015	0,737207	761205	11179,6	5,85
Kab. Situbondo	2011	0,78853	653609	8927,1	6,19
	2012	0,735468	657874	9411,6	6,21

	2013	0,760395	660702	9993,8	6,28
	2014	0,721264	666013	10572,4	6,36
	2015	0,727668	669713	11086,5	6,41
Kab. Probolinggo	2011	0,844155	1107923	15912,5	5,8
	2012	0,817923	1116390	16936,8	5,91
	2013	0,818691	1123204	17808,9	6,31
	2014	0,815103	1132690	18682,2	5,9
	2015	0,812906	1140480	19571	6,09
Kab. Pasuruan	2011	0,793436	1530287	65271,6	6,53
	2012	0,72258	1543723	70167,1	6,82
	2013	0,753879	1556711	75044	6,88
	2014	0,707346	1569507	80105,4	7,06
	2015	0,740444	1581787	84415,7	7,1
Kab. Sidoarjo	2011	0,70525	1983271	87212,4	9,84
	2012	0,787974	2016974	93543,9	9,92
	2013	0,721041	2048986	99992,5	10,23
	2014	0,725867	2083924	106434,3	10,11
	2015	0,76634	2117279	112012,9	10,46
Kab. Mojokerto	2011	0,75981	1039299	36405,8	7,82
	2012	0,760019	1049886	39047,3	7,94
	2013	0,774736	1057808	41608,4	8,22
	2014	0,710703	1070486	44292	8,32
	2015	0,754791	1080389	46792,3	8,19
Kab. Jombang	2011	0,786416	1212881	18385	7,83
	2012	0,710067	1220404	19514,8	8,04
	2013	0,739901	1230881	20672,3	8,06
	2014	0,752181	1234501	21793,2	8,28
	2015	0,767817	1240985	22960,2	8,1
Kab. Nganjuk	2011	0,777224	1024105	12061,2	7,43
	2012	0,777974	1028914	12767	7,6
	2013	0,737759	1033597	13456	7,62
	2014	0,774485	1037723	14142,9	7,67
	2015	0,802022	1041716	14875,4	7,8
Kab. Madiun	2011	0,758543	666305	8608,7	7,39
	2012	0,789122	669088	9135,7	7,44
	2013	0,71143	671883	9654,1	7,47
	2014	0,66528	673988	10169,7	7,74
	2015	0,667349	676087	10704,9	7,54
Kab. Magetan	2011	0,712477	622902	8744,8	7,6
	2012	0,663601	624373	9251,2	7,84
	2013	0,666295	625703	9792,6	7,86
	2014	0,659498	626614	10291,7	7,99
	2015	0,648057	627413	10823,9	8,15

Kab. Ngawi	2011	0,757185	820880	8973,3	6,99
	2012	0,741514	822605	9568,2	7,01
	2013	0,704099	824587	10094	7,06
	2014	0,703312	827829	10681	7,04
	2015	0,70472	828783	11223,1	6,72
Kab. Bojonegoro	2011	0,795355	1217775	36751	6,67
	2012	0,820129	1223079	38136,1	6,72
	2013	0,813579	1227704	39039,4	6,72
	2014	0,798835	1232386	39934,8	6,73
	2015	0,835473	1236607	46892,8	7,28
Kab. Tuban	2011	0,816903	1127884	29934,3	6,49
	2012	0,853127	1134584	31816,3	6,52
	2013	0,803186	1141497	33678,8	6,82
	2014	0,800194	1147097	35519,9	6,81
	2015	0,809289	1152915	37256	6,83
Kab. Lamongan	2011	0,77591	1182808	17360,5	7,46
	2012	0,772311	1184581	18562,7	7,59
	2013	0,750293	1186382	19848,8	7,79
	2014	0,724412	1187084	21099,9	7,86
	2015	0,75366	1187795	22316,9	7,61
Kab. Gresik	2011	0,794877	1196516	62898,7	8,84
	2012	0,819572	1211686	67248,8	8,98
	2013	0,802217	1227101	71314,2	9
	2014	0,777345	1241613	76336	8,87
	2015	0,798246	1256313	81360,4	9,31
Kab. Bangkalan	2011	0,86243	918813	16406,5	5,29
	2012	0,807648	928024	16173,7	5,73
	2013	0,837577	937497	16204	5,75
	2014	0,826701	945821	17369,2	5,94
	2015	0,826412	954305	16906,8	5,79
Kab. Sampang	2011	0,869428	892301	10315,3	4,19
	2012	0,830456	903613	10910,9	4,22
	2013	0,846407	913499	11623,8	4,39
	2014	0,83629	925911	11632,9	4,62
	2015	0,832948	936801	11874,5	4,84
Kab. Pamekasan	2011	0,831183	808114	7429,4	6,31
	2012	0,788288	817690	7894	6,31
	2013	0,791251	827407	8375,2	6,42
	2014	0,76157	836224	8846,2	6,55
	2015	0,761211	845314	9316,9	6,54
Kab. Sumenep	2011	0,8025	1050678	16064,8	5,64
	2012	0,807084	1056415	17665	5,7
	2013	0,784829	1061211	20218,1	5,73

	2014	0,774509	1067202	21476,9	5,62
	2015	0,75783	1072113	21750,6	5,76
Kota Kediri	2011	0,771049	271511	60020,1	10,21
	2012	0,88437	273695	63185,1	10,23
	2013	0,665995	276619	65408,8	10,29
	2014	0,598652	278072	69232,9	10,16
	2015	0,616367	280004	72945,5	10,25
Kota Blitar	2011	0,727574	133492	3038,4	9,75
	2012	0,679195	134723	3236,6	9,77
	2013	0,664241	135702	3446,8	9,87
	2014	0,631627	136903	3649,6	9,97
	2015	0,624702	137908	3856,9	10,08
Kota Malang	2011	0,749157	828491	33273,7	10,84
	2012	0,793271	834527	35355,7	10,87
	2013	0,696272	840803	37547,7	10,89
	2014	0,678704	845973	39724,7	10,81
	2015	0,83991	851298	41952,1	10,55
Kota Probolinggo	2011	0,847594	220102	5213,9	8,52
	2012	0,715258	222292	5552,1	8,67
	2013	0,728394	223881	5911,3	8,79
	2014	0,696291	226777	6261,9	8,24
	2015	0,679258	229013	6628,8	8,8
Kota Pasuruan	2011	0,756498	188414	3810,7	8,96
	2012	0,602012	190191	4051,2	9,05
	2013	0,71274	192285	4315,1	9,07
	2014	0,703514	193329	4561,3	8,68
	2015	0,692437	194815	4813,3	9,15
Kota Mojokerto	2011	0,733452	121517	3165,6	9,97
	2012	0,739048	122594	3358,4	10,1
	2013	0,709255	123806	3566,7	10,12
	2014	0,704524	124719	3774,6	10,06
	2015	0,688087	125706	3991,4	10,1
Kota Madiun	2011	0,573124	172073	6494,4	10,43
	2012	0,618336	172886	6937,7	10,46
	2013	0,543571	174114	7470,7	10,54
	2014	0,524605	174373	7965,3	10,66
	2015	0,489693	174995	8455,4	11,22
Kota Surabaya	2011	0,569433	2788932	247686,6	10,07
	2012	0,889478	2805718	265892,1	10,1
	2013	0,76123	2821929	286050,7	10,12
	2014	0,720861	2833924	305947,6	10,08
	2015	0,717443	2848583	324215,2	10,54
Kota Batu	2011	0,714128	192813	6968	8,52

	2012	0,321429	194700	7473,6	8,53
	2013	0,663725	196189	8018,6	8,76
	2014	0,642481	198608	8572,1	8,66
	2015	0,631358	200485	9145,9	8,94

Lampiran 3: Hasil *Output Stochastic Frontier Approach (SFA)*

Output from the program FRONTIER (Version 4.1c)

instruction file = terminal

data file = sfa2.txt

Tech. Eff. Effects Frontier (see B&C 1993)

The model is a production function

The dependent variable is logged

the ols estimates are :

	coefficient	standard-error	t-ratio
beta 0	-0.99487134E+01	0.12756336E+01	-0.77990367E+01
beta 1	0.10388385E-01	0.89893360E-01	0.11556343E+00
beta 2	0.37830144E+00	0.72819108E-01	0.51950848E+01
beta 3	0.18717836E+01	0.15661478E+00	0.11951513E+02
beta 4	-0.62443978E+00	0.17637708E+00	-0.35403680E+01
sigma-squared	0.32978403E+00		

log likelihood function = -0.16167969E+03

the estimates after the grid search were :

beta 0 -0.96397268E+01

beta 1 0.10388385E-01

beta 2 0.37830144E+00

beta 3 0.18717836E+01

beta 4 -0.62443978E+00

sigma-squared 0.41657820E+00

gamma 0.36000000E+00

iteration = 0 func evals = 19 llf = -0.16144934E+03

-0.96397268E+01 0.10388385E-01 0.37830144E+00 0.18717836E+01-
0.62443978E+00

0.41657820E+00 0.36000000E+00

gradient step

iteration = 5 func evals = 42 llf = -0.16140938E+03

-0.96239918E+01 0.17765891E-01 0.36983458E+00 0.18557668E+01-
0.60801158E+00

0.42395052E+00 0.38310782E+00

pt better than entering pt cannot be found

iteration = 10 func evals = 84 llf = -0.16139018E+03

-0.93602189E+01 0.23032701E-01 0.36650454E+00 0.18489223E+01-
0.62212007E+00

0.43238305E+00 0.40576859E+00

the final mle estimates are :

coefficient standard-error t-ratio

beta 0 -0.93602189E+01 0.13704709E+01 -0.68299291E+01

beta 1 0.23032701E-01 0.87298691E-01 0.26383787E+00

beta 2 0.36650454E+00 0.70332441E-01 0.52110311E+01
 beta 3 0.18489223E+01 0.16018194E+00 0.11542639E+02
 beta 4 -0.62212007E+00 0.17272798E+00 -0.36017330E+01
 sigma-squared 0.43238305E+00 0.11533361E+00 0.37489771E+01
 gamma 0.40576859E+00 0.27710911E+00 0.14642918E+01

log likelihood function = -0.16139018E+03

LR test of the one-sided error = 0.57902294E+00

with number of restrictions = 1

[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]

number of iterations = 10

(maximum number of iterations set at : 100)

number of cross-sections = 190

number of time periods = 1

total number of observations = 190

thus there are: 0 obsns not in the panel

covariance matrix :

0.18781904E+01 0.43264915E-01 -0.10522821E-01 -0.83372549E-01 -
 0.81276844E-01

0.58253421E-01 0.15164125E+00
 0.43264915E-01 0.76210615E-02 0.11940285E-02 -0.14861561E-02 -
 0.95196188E-02
 0.16826201E-02 0.44232036E-02
 -0.10522821E-01 0.11940285E-02 0.49466523E-02 -0.49849011E-02
 0.62276090E-03
 -0.12972259E-02 -0.34164417E-02
 -0.83372549E-01 -0.14861561E-02 -0.49849011E-02 0.25658253E-01 -
 0.15015810E-01
 -0.35104415E-02 -0.92532916E-02
 -0.81276844E-01 -0.95196188E-02 0.62276090E-03 -0.15015810E-01
 0.29834956E-01
 0.58606263E-05 -0.11576134E-05
 0.58253421E-01 0.16826201E-02 -0.12972259E-02 -0.35104415E-02
 0.58606263E-05
 0.13301841E-01 0.29483180E-01
 0.15164125E+00 0.44232036E-02 -0.34164417E-02 -0.92532916E-02 -
 0.11576134E-05
 0.29483180E-01 0.76789461E-01

technical efficiency estimates :

firm	year	eff.-est.
1	1	0.77698040E+00
2	1	0.78410435E+00
3	1	0.72184436E+00
4	1	0.67476163E+00
5	1	0.66914511E+00
6	1	0.69939361E+00

7	1	0.63763901E+00
8	1	0.66889421E+00
9	1	0.63486569E+00
10	1	0.63990687E+00
11	1	0.75105145E+00
12	1	0.70815296E+00
13	1	0.71311889E+00
14	1	0.76719970E+00
15	1	0.76360969E+00
16	1	0.65115293E+00
17	1	0.70149972E+00
18	1	0.59856624E+00
19	1	0.66108124E+00
20	1	0.64468625E+00
21	1	0.72718163E+00
22	1	0.77318876E+00
23	1	0.68176626E+00
24	1	0.67068931E+00
25	1	0.66456139E+00
26	1	0.81119436E+00
27	1	0.77543246E+00
28	1	0.75359620E+00
29	1	0.74897466E+00
30	1	0.76204686E+00
31	1	0.75207631E+00
32	1	0.76515403E+00
33	1	0.74733212E+00
34	1	0.72847914E+00

35	1	0.74341978E+00
36	1	0.78170761E+00
37	1	0.79100014E+00
38	1	0.74252407E+00
39	1	0.72546502E+00
40	1	0.72210886E+00
41	1	0.76288423E+00
42	1	0.79275133E+00
43	1	0.76161951E+00
44	1	0.74717034E+00
45	1	0.74632985E+00
46	1	0.74396370E+00
47	1	0.74821383E+00
48	1	0.71391515E+00
49	1	0.71878888E+00
50	1	0.72775182E+00
51	1	0.78796759E+00
52	1	0.75942636E+00
53	1	0.75081753E+00
54	1	0.73370427E+00
55	1	0.73720706E+00
56	1	0.78852976E+00
57	1	0.73546814E+00
58	1	0.76039478E+00
59	1	0.72126413E+00
60	1	0.72766767E+00
61	1	0.84415452E+00
62	1	0.81792259E+00

63	1	0.81869078E+00
64	1	0.81510262E+00
65	1	0.81290632E+00
66	1	0.79343597E+00
67	1	0.72258020E+00
68	1	0.75387877E+00
69	1	0.70734644E+00
70	1	0.74044393E+00
71	1	0.70524983E+00
72	1	0.78797433E+00
73	1	0.72104098E+00
74	1	0.72586747E+00
75	1	0.76633981E+00
76	1	0.75980951E+00
77	1	0.76001896E+00
78	1	0.77473631E+00
79	1	0.71070349E+00
80	1	0.75479115E+00
81	1	0.78641649E+00
82	1	0.71006668E+00
83	1	0.73990118E+00
84	1	0.75218093E+00
85	1	0.76781712E+00
86	1	0.77722430E+00
87	1	0.77797350E+00
88	1	0.73775891E+00
89	1	0.77448511E+00
90	1	0.80202189E+00

91	1	0.75854299E+00
92	1	0.78912180E+00
93	1	0.71143031E+00
94	1	0.66528047E+00
95	1	0.66734884E+00
96	1	0.71247676E+00
97	1	0.66360087E+00
98	1	0.66629529E+00
99	1	0.65949812E+00
100	1	0.64805733E+00
101	1	0.75718537E+00
102	1	0.74151359E+00
103	1	0.70409875E+00
104	1	0.70331201E+00
105	1	0.70471954E+00
106	1	0.79535469E+00
107	1	0.82012859E+00
108	1	0.81357862E+00
109	1	0.79883543E+00
110	1	0.83547326E+00
111	1	0.81690261E+00
112	1	0.85312719E+00
113	1	0.80318561E+00
114	1	0.80019374E+00
115	1	0.80928908E+00
116	1	0.77590979E+00
117	1	0.77231111E+00
118	1	0.75029260E+00

119	1	0.72441210E+00
120	1	0.75365951E+00
121	1	0.79487656E+00
122	1	0.81957246E+00
123	1	0.80221716E+00
124	1	0.77734545E+00
125	1	0.79824588E+00
126	1	0.86243014E+00
127	1	0.80764849E+00
128	1	0.83757689E+00
129	1	0.82670139E+00
130	1	0.82641231E+00
131	1	0.86942799E+00
132	1	0.83045566E+00
133	1	0.84640735E+00
134	1	0.83629021E+00
135	1	0.83294750E+00
136	1	0.83118313E+00
137	1	0.78828829E+00
138	1	0.79125096E+00
139	1	0.76156965E+00
140	1	0.76121092E+00
141	1	0.80249975E+00
142	1	0.80708424E+00
143	1	0.78482925E+00
144	1	0.77450904E+00
145	1	0.75783003E+00
146	1	0.77104901E+00

147	1	0.88436963E+00
148	1	0.66599514E+00
149	1	0.59865152E+00
150	1	0.61636682E+00
151	1	0.72757411E+00
152	1	0.67919471E+00
153	1	0.66424133E+00
154	1	0.63162694E+00
155	1	0.62470160E+00
156	1	0.74915739E+00
157	1	0.79327059E+00
158	1	0.69627196E+00
159	1	0.67870355E+00
160	1	0.83991020E+00
161	1	0.84759411E+00
162	1	0.71525791E+00
163	1	0.72839386E+00
164	1	0.69629054E+00
165	1	0.67925772E+00
166	1	0.75649813E+00
167	1	0.60201174E+00
168	1	0.71274013E+00
169	1	0.70351431E+00
170	1	0.69243708E+00
171	1	0.73345192E+00
172	1	0.73904795E+00
173	1	0.70925524E+00
174	1	0.70452374E+00

175	1	0.68808739E+00
176	1	0.57312367E+00
177	1	0.61833589E+00
178	1	0.54357111E+00
179	1	0.52460471E+00
180	1	0.48969334E+00
181	1	0.75694330E+00
182	1	0.88947840E+00
183	1	0.76123011E+00
184	1	0.72086113E+00
185	1	0.71744296E+00
186	1	0.71412760E+00
187	1	0.32142900E+00
188	1	0.66372534E+00
189	1	0.64248110E+00
190	1	0.63135814E+00

mean efficiency = 0.73801067E+00

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4: *Common Effect Model*

Dependent Variable: EFISIENSI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/27/18 Time: 05:37
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PENDUDUK	-3.66E-09	1.30E-08	-0.282014	0.7782
PDRB	0.025259	0.008507	2.969277	0.0034
PENDIDIKAN	-0.024459	0.003275	-7.469328	0.0000
C	0.681938	0.067642	10.08163	0.0000
R-squared	0.301862	Mean dependent var	0.737024	
Adjusted R-squared	0.290602	S.D. dependent var	0.074630	
S.E. of regression	0.062858	Akaike info criterion	-2.675055	
Sum squared resid	0.734905	Schwarz criterion	-2.606697	
Log likelihood	258.1302	Hannan-Quinn criter.	-2.647364	
F-statistic	26.80766	Durbin-Watson stat	1.207661	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 5: *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: EFISIENSI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/22/18 Time: 09:20
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JML_PENDUDUK	7.32E-07	3.78E-07	1.937607	0.0546
PDRB	-0.240961	0.062189	-3.874672	0.0002
PENDIDIKAN	-0.012788	0.024316	-0.525895	0.5997
C	2.461857	0.412566	5.967188	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.693187	Mean dependent var	0.737024
Adjusted R-squared	0.610821	S.D. dependent var	0.074630
S.E. of regression	0.046557	Akaike info criterion	-3.107759
Sum squared resid	0.322971	Schwarz criterion	-2.407086
Log likelihood	336.2371	Hannan-Quinn criter.	-2.823927
F-statistic	8.415940	Durbin-Watson stat	2.370159
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6: *Random Effect Model*

Dependent Variable: EFISIENSI
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/27/18 Time: 05:40
 Sample: 2011 2015
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 38
 Total panel (balanced) observations: 190
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JML_PENDUDUK	1.05E-08	2.10E-08	0.498306	0.6189
PDRB	0.013206	0.013663	0.966526	0.3350
PENDIDIKAN	-0.023894	0.005288	-4.518422	0.0000
C	0.781588	0.108400	7.210200	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.041405	0.4416
Idiosyncratic random		0.046557	0.5584

Weighted Statistics			
R-squared	0.128473	Mean dependent var	0.331112
Adjusted R-squared	0.114416	S.D. dependent var	0.051748
S.E. of regression	0.048698	Sum squared resid	0.441097
F-statistic	9.139488	Durbin-Watson stat	1.856783
Prob(F-statistic)	0.000011		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.293608	Mean dependent var	0.737024
Sum squared resid	0.743594	Durbin-Watson stat	1.174380

Lampiran 7: Uji Chow Test (*Likelihood Ratio Test*)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FIXED

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.136272	(37,149)	0.0000
Cross-section Chi-square	156.213788	37	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: EFISIENSI

Method: Panel Least Squares

Date: 02/22/18 Time: 09:22

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
JML_PENDUDUK	-3.66E-09	1.30E-08	-0.282014	0.7782
PDRB	0.025259	0.008507	2.969277	0.0034
PENDIDIKAN	-0.024459	0.003275	-7.469328	0.0000
C	0.681938	0.067642	10.08163	0.0000
R-squared	0.301862	Mean dependent var		0.737024
Adjusted R-squared	0.290602	S.D. dependent var		0.074630
S.E. of regression	0.062858	Akaike info criterion		-2.675055
Sum squared resid	0.734905	Schwarz criterion		-2.606697
Log likelihood	258.1302	Hannan-Quinn criter.		-2.647364
F-statistic	26.80766	Durbin-Watson stat		1.207661
Prob(F-statistic)	0.000000			

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 8: Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: FIXED
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.496077	3	0.0001

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
JML_PENDUDUK	0.000001	0.000000	0.000000	0.0558
PDRB	-0.240961	0.013206	0.003681	0.0000
PENDIDIKAN	-0.012788	-0.023894	0.000563	0.6398

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: EFISIENSI

Method: Panel Least Squares

Date: 02/22/18 Time: 09:23

Sample: 2011 2015

Periods included: 5

Cross-sections included: 38

Total panel (balanced) observations: 190

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.461857	0.412566	5.967188	0.0000
JML_PENDUDUK	7.32E-07	3.78E-07	1.937607	0.0546
PDRB	-0.240961	0.062189	-3.874672	0.0002
PENDIDIKAN	-0.012788	0.024316	-0.525895	0.5997

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.693187	Mean dependent var	0.737024
Adjusted R-squared	0.610821	S.D. dependent var	0.074630
S.E. of regression	0.046557	Akaike info criterion	-3.107759
Sum squared resid	0.322971	Schwarz criterion	-2.407086
Log likelihood	336.2371	Hannan-Quinn criter.	-2.823927
F-statistic	8.415940	Durbin-Watson stat	2.370159
Prob(F-statistic)	0.000000		

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Afifah Nur Islami
 Tempat, tanggal lahir : Sleman, 11 Desember 1993
 Alamat : Plasan Jetis, RT 013/RW 036
 Tirtomartani Kalasan Sleman,
 Yogyakarta
 Agama : Islam
 No. Telepon : 0856 4227 8955
 E-mail : afifahni93@gmail.com



RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Fatimah Azzahrah, Yogyakarta
 SD Muhammadiyah Dhuri, Yogyakarta
 MTs N 1 Prambanan, Klaten
 SMA N 1 Prambanan, Klaten
 PT UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

2016 Sekretaris Bidang Kerohanian Islam OSIS SMA N 1 Prambanan
 2016 Anggota aktif Forum Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (ForSEBI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 2016-sekarang Pengurus Staff Media dan Jurnalistik ForSEBI (Forum Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam) UIN Sunan Kalijaga

PENGALAMAN KEGIATAN

2016 MC Pelatihan *Sharia Banking Training Center* (SBTC) 4
 2016 Peserta Acara Diskusi Publik “*Komite Nasional Keuangan Syariah sebagai Strategi Indonesia Menuju Pusat Keuangan Syariah di Dunia*” UIN Sunan Kalijaga